

**PARTISIPASI KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH: STUDI
ANALITIS KOMPARATIF DUA SEKOLAH DASAR DI KECAMARAN PARIGI**

Hironimus Jampi¹, Kaharuddin², Jamaluddin Arifin³

^{1, 2, 3} Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Muhammadiyah Makassar,

hironimusjampi1993@gmail.com; kaharuddin@unismuh.ac.id;
jamaluddinarifin@unismuh.ac.id

ABSTRACT

The basic assumption of this study concerns the vagueness of the existence of school committees, therefore, their participation is still being debated. This comparative case study explicitly adopts a qualitative method in which the investigation is directed at the Forms and differential aspects of the participation of two committees, namely Pattallassang and Batumenteng, which are modeled through the features of Nvivo 12 Plus. The study involved 10 respondents to obtain an overview of the specific and general aspects of the two committees, and data were collected using interview and observation techniques. The results of the analysis show that there are four forms of participation between the two committees, namely: a) Ensuring the Quality of Education Services; b) Social Service; c) School Management, and; d) Providing Assistance. While the differences in participation between the two are influenced by two general categories with specific sub-indicators, namely: 1) Knowledge Factor, and; 2) Motivation Factor or Participation Mode.

Keyword: participation, school committee, case study, comparative analysis

ABSTRAK

Asumsi dasar penelitian ini berkenaan dengan kekaburan eksistensi komite sekolah yang karenanya, partisipasinya masih terus diperdebatkan. Studi kasus komparatif ini secara eksplisit mengadopsi metode kualitatif di mana penyelidikan diarahkan pada Bentuk dan aspek diferensial dalam partisipasi dua komite yaitu Pattallassang dan Batumenteng yang dimodelkan melalui fitur-fitur Nvivo 12 Plus. Penelitian melibatkan 10 responden untuk memperoleh gambaran umum terkait aspek-aspek spesifik maupun umum dari kedua komite, dan data dikumpulkan dengan teknik wawancara serta observasi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa terdapat empat bentuk partisipasi di antara kedua komite yaitu: a) Memastikan Kualitas Layanan Pendidikan; b) Bakti Sosial; c) Pengelolaan Sekolah, dan; d) Memberi Bantuan. Sementara perbedaan partisipasi keduanya dipengaruhi oleh dua kategori umum dengan sub-indikator yang spesifik yaitu: 1) Faktor Pengetahuan, dan; 2) Faktor Motivasi atau Modus partisipasi.

Kata Kunci: partisipasi, komite sekolah, studi kasus, analisis komparatif

A. Pendahuluan

Demi tujuan menghasilkan sumberdaya manusia bagi sebuah bangsa, lembaga pendidikan formal yang dalam konteks ini adalah sekolah dasar, mengambil peran krusial tidak hanya sebagai salah satu instrumen pendidikan yang cenderung hierarkis, tetapi juga sekaligus merupakan institusi yang otonom di mana dalam kerangka inilah bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (selanjutnya disingkat: MBS), diterapkan sebagai suatu paradigma bagi disiplin manajemen pendidikan (Febriana, 2019). Apa yang menjadi penting untuk dipahami dalam konteks ini adalah, bahwa paradigma tersebut—baik konseptual maupun praksis, akan mengandaikan kolaborasi dari setidaknya tiga fitur penting: 1) Model Kepemimpinan; 2) Partisipasi Badan Komite Sekolah, dan tentu saja; 3) Kompetensi Pendidik (Hanafi, 2015; Nela Seriyanti, Syarwani Ahmad, 2021).

Fitur-fitur tersebut dengan demikian, merupakan prasyarat penting bagi bekerjanya paradigma Manajemen Berbasis Sekolah dan harus terpenuhi

sejak awal. Dalam analisis Marfinda (2022), fitur pertama tentu saja merupakan representasi fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin dari institusi tersebut sekaligus supervisi, fitur ketiga adalah domain guru sebagai tenaga pendidik yang kompeten, sementara fitur kedua tidak lain representasi dari aspirasi masyarakat yang dalam hal ini, diwakili wali murid (Askan & Kusmanto, 2022; Ismail et al., 2021; Mar'ati, 2022; Pohan, 2018). Dengan kata lain, fitur kedua merupakan domain dari bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mereka meningkatkan mutu pendidikan.

Perspektif tersebut mendukung argumen Hayani (2015) bahwa partisipasi dari para wali murid atau masyarakat yang dimaksud, mendudukan komite sekolah dalam peran badan tersebut sebagai salah satu fitur pendukung, pengontrol, pemberi pertimbangan, dan penghubung yang memungkinkan relasi dialogis antara pihak sekolah dengan masyarakat. Abidin (2021) juga memberikan aksentuasi tertentu mengenai peran masyarakat yang menurutnya, lebih

positif daripada negatif. Meskipun jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih jernih, argumen tersebut sama sekali tidak eksplisit merujuk pada salah satu aspek fungsional peran komite yang dijelaskan dalam analisis pertama (misalnya sebagai fitur pendukung, pengontrol, pemberi pertimbangan, maupun sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah).

Komunikasi paralel dan terbuka antara pihak sekolah juga masyarakat dengan kata lain, dapat mendorong suatu terobosan yang diperlukan terutama dalam aspek kebijakan yang akan dihasilkan sebagai acuan kolektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akan tetapi, tentu saja, seperti yang dinyatakan oleh Supriadi (2017) bahwa dalam praktiknya, gambaran ideal tentang hubungan antara institusi sekolah dan komite tidak selalu akan demikian. Terdapat ironi antara eksistensi komite dan peran serta tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Tomasila and Rumtutuly (2021) membuktikan bahwa partisipasi pihak masyarakat yang dijembatani oleh badan komite, seringkali jauh dari harapan. Menurut pandangan ini, tantangannya bukan

pada tataran konsep tentang komite sekolah yang memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara umum, namun justru pada fakta bahwa sebagian besar mereka yang terlibat dalam komite sekolah tidak memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok mereka (selanjutnya disebut: tupokasi).

Dengan demikian, badan komite sekolah dapat dikatakan—dalam analisis terakhir, mengalami semacam disorientasi dan disfungsi di mana para aktor tidak memiliki cukup pengetahuan tentang tupoksi mereka yang pada akhirnya, menimbulkan ketidakjelasan dalam eksistensi badan tersebut. Faktanya, peran komite sekolah seperti ditunjukkan oleh Bisri (2020) menjadi tidak maksimal hanya karena sebagian besar anggota komite, tidak memahami apa tugas dan fungsi mereka dalam kaitannya dengan relasi mereka dengan pihak sekolah.

Problem-problem spesifik semacam ini seringkali ditemukan terjadi, termasuk dalam konteks studi kasus ini yang secara detail menyoroti partisipasi dua komite berbeda di dua sekolah yang berbeda yaitu komite Pattallasang dan Batumenteng, di

mana realitas yang umum menunjukkan tingkat diferensiasi peran dan fungsi yang relatif berbeda di kedua komite tersebut. Komite Batumenteng misalnya, memperlihatkan level partisipasi yang cenderung kurang signifikan dan efektif. Sementara di sisi lain, komite Pattallassang untuk konteks yang sama, menunjukkan partisipasi yang jauh lebih efektif dalam upaya kolaboratif para anggotanya dengan pihak sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Fakta ini memang menciptakan kontras di antara kedua subjek penelitian. Namun apakah yang melatari perbedaan partisipasi kedua komite tersebut selain fakta umum bahwa, memang terdapat kekurangan pemahaman terkait tugas dan fungsi mereka?

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan pada upaya eksploratif untuk menyingkap faktor-faktor yang mungkin menciptakan perbedaan partisipasi di antara kedua komite, yang juga karenanya, akan memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk spesifik dari partisipasi yang cenderung dipraktikkan oleh masing-masing komite dalam upaya badan tersebut meningkatkan mutu sekolah baik di SDN Batumenteng

maupun Pattallassang dan perbedaan yang terdapat dalam upaya keduanya.

B. Metode Penelitian

Studi kasus komparatif ini mengadopsi metode kualitatif yang dipadukan bersama dua pendekatan utama, yaitu realisme kritis dari Bhaskar (1976) terutama cara melihat realitas sebagai sesuatu yang terstratifikasi; dan fungsionalisme struktural dari Merton (1968/1949) juga pada tahap tertentu, Parsons (2005) untuk memahami sistem sosial. Pendekatan yang terakhir difungsikan sebagai cara pandang untuk mengurai struktur dan fungsi-fungsi struktur yang karenanya, memungkinkan upaya melihat bentuk-bentuk dari partisipasi masing-masing komite. Sedangkan pendekatan pertama akan menunjukkan modus dari tindakan para aktor yang dengan demikian, juga mengondisikan bentuk dari partisipasi di antara komite yang terbentuk berdasarkan tindakan para aktor.

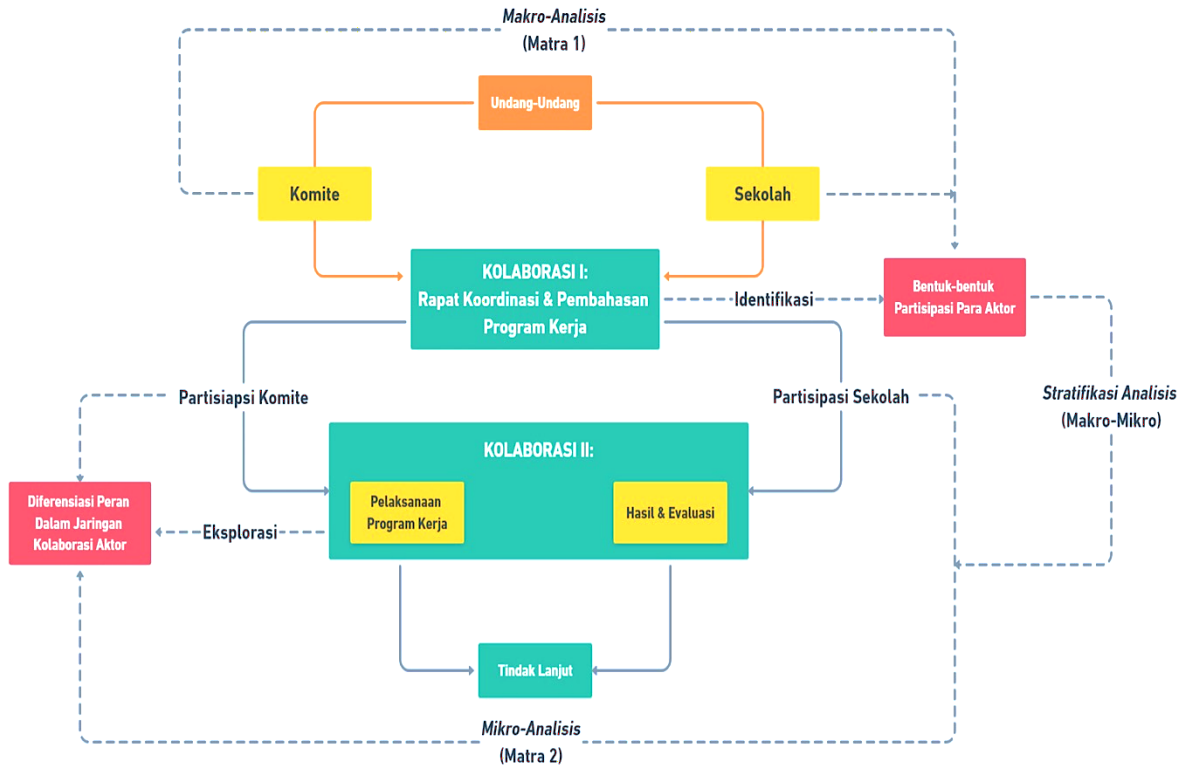
Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Inpres Batumenteng yang beralamat di PR2X+QFH, Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai salah satu

lokus; juga di Sekolah Dasar Inpres Pattallassang yang berada di QHP5+FFV, Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, di Sulawesi Selatan sebagai lokus lain yang ditentukan berdasarkan eksistensi badan komite.

Data-data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan standar yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif seperti wawancara dan observasi. Analisis akan berjalan dalam tiga tahapan teknis menggunakan tools N-Vivo 12 Plus dan sengaja tidak disistematisasi karena pertimbangan praktis bahwa dalam setiap momen

praktik di lapangan, peneliti potensial memperoleh suatu bentuk atau model yang menjelaskan struktur fenomena secara spasial dan membantu untuk membuat prediksi. Sebab tidak mungkin mengontrol suatu fenomena kecuali peneliti akan mengabaikan kekhasan fenomena tersebut, berikut subjek yang terlibat di dalamnya.

Ketiga tahapan yang dimaksud, diterjemahkan ke dalam beberapa frasa teknis sesuai level analisis dan desain kerangka pikir (selanjutnya lihat gambar 1) yaitu: 1) Tahap Identifikasi; 2) Tahap Eksplorasi, juga; 3) Tahap Elaborasi dan eksplanasi.

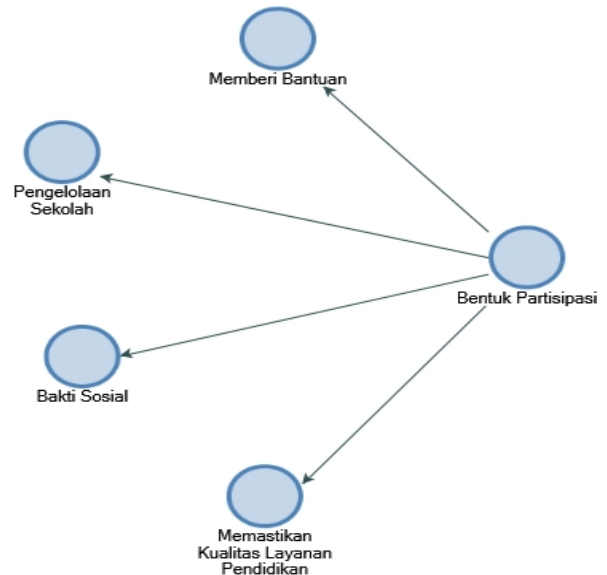


Gambar 1. Alur Analisis

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Komite Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Paling tidak, empat kategori utama mengenai bentuk partisipasi dapat diklasifikasi sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian dan preferensi jawaban masing-masing informan. Kategori-kategori tersebut selanjutnya dijelaskan lebih jauh dengan tentu saja, bertolak pada hasil analisis visual *project map* (perhatikan gambar 2) yang telah dilakukan dalam analisis tahap pertama.



Gambar 2. Bentuk-Bentuk Umum Partisipasi Komite Berdasarkan Preferensi Informan

Sesuai hasil tersebut dan berdasarkan preferensi jawaban masing-masing informan, bentuk-bentuk umum dari partisipasi komite menurut para informan dapat diklasifikasi ke dalam empat kategori besar: a) Memastikan Kualitas Layanan Pendidikan; b) Bakti Sosial; c) Pengelolaan Sekolah, dan; d) Memberi Bantuan. Mengacu pada hasil tersebut, analisis kemudian difokuskan pada masing-masing bentuk dari partisipasi tersebut untuk menggali lebih jauh preferensi para informan tentang contoh-contoh aktual dan empirik maupun rill dari setiap kategori. Sesuai gagasan tersebut, dalam bentuk partisipasi "*Memastikan Kualitas Layanan Pendidikan*" misalnya, preferensi dari sebagian informan merujuk pada salah satu kegiatan yang melibatkan para anggota komite yaitu program ekstrakurikuler, yang dalam kasus penelitian ini, adalah domain dari setidaknya tiga aktivitas spesifik yaitu Olimpiade, Lomba Budaya, serta Olahraga dan Pramuka.

Secara lebih jauh, hal ini selaras dengan pernyataan dari Mardiyah (2017) bahwa sebagai badan pendukung, anggota komite juga memiliki kewajiban

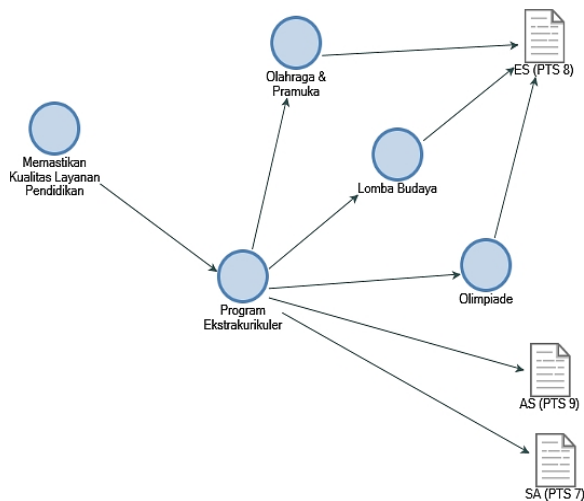
mengembangkan kegiatan dan program-program ekstrakurikuler. Pernyataan ini dipertegas misalnya oleh keterangan dari SA selaku ketua komite SD Inpres Pattallasang, terhadap pertanyaan tentang bentuk kontribusi anggota komite. Dalam hal ini, ia menyatakan:

[...] saya menampung saran dan kritik, pendapat dan pandangan baik dari kalangan orang tua murid maupun para guru, sebagai bahan pertimbangan untuk misalnya mengawasi pelayanan dan pelaksanaan pembelajaran (termasuk ekstrakurikuler) [...] (W/SA/PTS/9-02-2025)

Terhadap pertanyaan yang sama, informan lain juga menegaskan keterlibatannya sebagai anggota komite dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, walaupun juga dalam konteks ini, harus diakui bahwa faktor pengetahuan tampaknya potensial memengaruhi pemahaman di antara para aktor dan pada akhirnya juga, tingkat keterlibatan mereka masing-masing. AS dalam keterangannya, menyatakan:

[...] tergantung, sekolah ada kegiatan apa, begitu e [...] pernah juga untuk kegiatan Ekstrakurikuler, tapi ndak kutauji apa [...] (W/AS/PTS/6-02-2025)

Secara visual, bentuk-bentuk spesifik dari kegiatan ekstrakurikuler dalam identifikasi peneliti yang berkaitan dengan upaya “*Memastikan Kualitas Layanan Pendidikan*” antara lain, memang sesuai dengan program ekstrakurikuler yang dimaksud (perhatikan gambar 3) yang mencakup beberapa kegiatan seperti tampak pada visualisasi berikut.



Gambar 3. Jejaring Spesifik Bentuk Partisipasi Memastikan Kualitas Layanan Pendidikan Berdasarkan Preferensi Informan

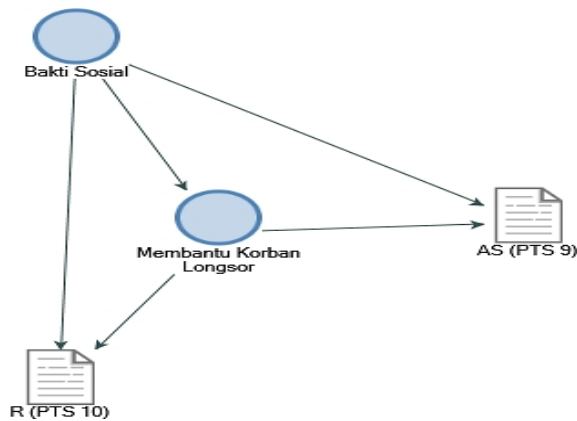
Bentuk-bentuk spesifik seperti terlihat dalam visualisasi tersebut (Olimpiade, Lomba Budaya juga Olahraga dan Pramuka), diperoleh dari preferensi informan ES yang memberikan keterangan tentang kontribusi para anggota komite di Pattalassang, sesuai dengan

pengalamannya sebagai salah satu aktor dalam partisipasi di mana informan tersebut mengatakan:

[...] Saya dan Ibu-ibu lain sih biasanya ikut serta, memantau dan mendukung kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, ada lomba budaya, atau olimpiade, pramuka dan olahraga, begitu e! [...] (W/ES/PTS/11-02-2025)

Pernyataan ini selaras dengan hasil yang diperoleh Anggraini et al (2018) dalam analisisnya bahwa komite juga berpartisipasi dalam perencanaan, layanan, serta dukungan moril dan materil pada kegiatan kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat rutin maupun periodik.

Bentuk spesifik lain dari partisipasi berdasarkan hasil analisis peneliti dari data-data wawancara bersama para informan, adalah “*Bakti Sosial*”. Secara aktual, jenis ini hanya merujuk pada satu bentuk aktivitas yaitu: “Membantu Korban Longsor” (lihat gambar 4), yang teridentifikasi sebagai preferensi dari dua informan yaitu AS dan R.



Gambar 4. Jejaring Spesifik Bentuk Partisipasi Bakti Sosial Berdasarkan Preferensi Informan

Hasil tersebut bersesuaian dengan pandangan Septiana et al (2018: hal 298) bahwa partisipasi komite tidak hanya berhubungan dengan hal-hal atau kegiatan yang bersifat formal di sekolah, tetapi juga kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk dalam hal ini, bakti sosial. Terhadap hasil analisis tersebut, AS yang merupakan salah satu informan yang representatif untuk konteks ini terutama dalam hal mewakili preferensi terkait bentuk partisipasi Bakti Sosial dan khususnya, Membantu Korban Longsor, mengatakan:

[...] Pernahka itu hari anggota komite kumpul uang masing-masing ± 75.000.00 untuk bantu keluarga siswa/siswi yang kena Longsor kodong [...] (W/AS/PTS/6-02-2025)

Secara eksplisit, keterangan tersebut cukup spesifik merujuk pada

salah satu aktivitas sosial kemasyarakatan yang jelas menggambarkan bentuk partisipasi komite di mana, anggota-anggota komite yang secara khusus, komite Pattallasang, tidak hanya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan formal, namun juga kegiatan yang bersifat infomal atau bahkan non-formal. Pada tahap tertentu, hal ini juga merupakan penegasan tentang kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan para anggota komite. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Yanuarita et al (2021) dalam konteks dan kasus berbeda, di mana komite dan pihak sekolah di Sukorejo melakukan bakti sosial bagi para siswa kurang mampu.

Keterangan dari R, salah satu informan sekaligus anggota komite di SD Inpres Pattallasang juga memperkuat hasil analisis tersebut. Di sela aktivitasnya ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan tersebut dan menanyakan kontribusinya sebagai anggota komite, dia mengutarakan pengalaman yang tidak hanya memberikan gambaran bagi peneliti terkait bentuk-bentuk partisipasi, akan tetapi secara implisit juga memperkuat

keterangan informan sebelumnya (AS).

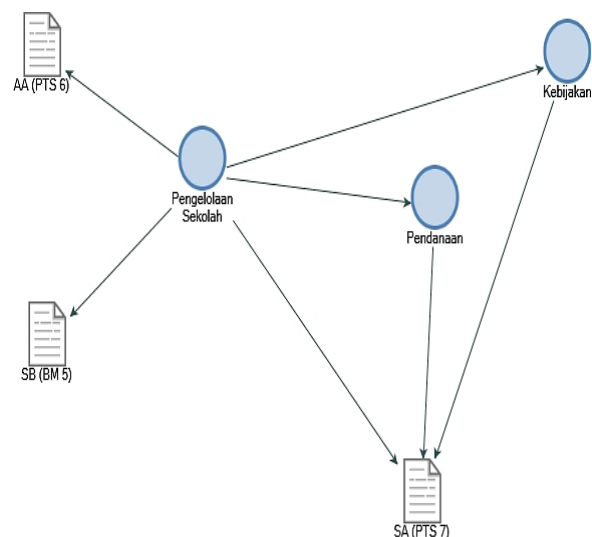
Secara jelas, R mengatakan:

[...] ikut membantu kegiatan, kemarin misalnya, komite membantu orang tua siswa yang terkena Longsor [...] (W/R/PTS/9-02-2025)

Selain mendeskripsikan pengalamannya yang tentu saja dalam hal ini subjektif, sebagai salah satu anggota komite di Inpres Pattallasang, keterangan yang diberikan oleh informan tersebut pada sisi lain, juga mengonfirmasi pengalaman yang juga pada sesi sebelumnya diberikan oleh AS ketika peneliti mewawancarai informan tersebut yang menyatakan, bahwa informan tersebut melakukan hal yang sama.

Selanjutnya, bentuk partisipasi lain yang telah teridentifikasi dalam analisis adalah “*Pengelolaan Sekolah*” (perhatikan gambar 5). Bentuk ini merujuk pada dua konsep spesifik yang secara mendasar dapat dikatakan sangat abstrak, yaitu Pendanaan dan Kebijakan. Bukan karena kedua konsep tersebut secara analitis tidak bisa dijelaskan, melainkan tidak terdapat *explanatory factor* atau faktor penjelas yang dapat digunakan untuk menjelaskan kedua konsep tersebut

sesuai preferensi para informan yang teridentifikasi. Dengan kata lain, preferensi masing-masing informan tidak memiliki rujukan aktual maupun empirik yang dapat digunakan secara jelas untuk menggambarkan secara konkret, terkait kedua konsep yang dimaksud.

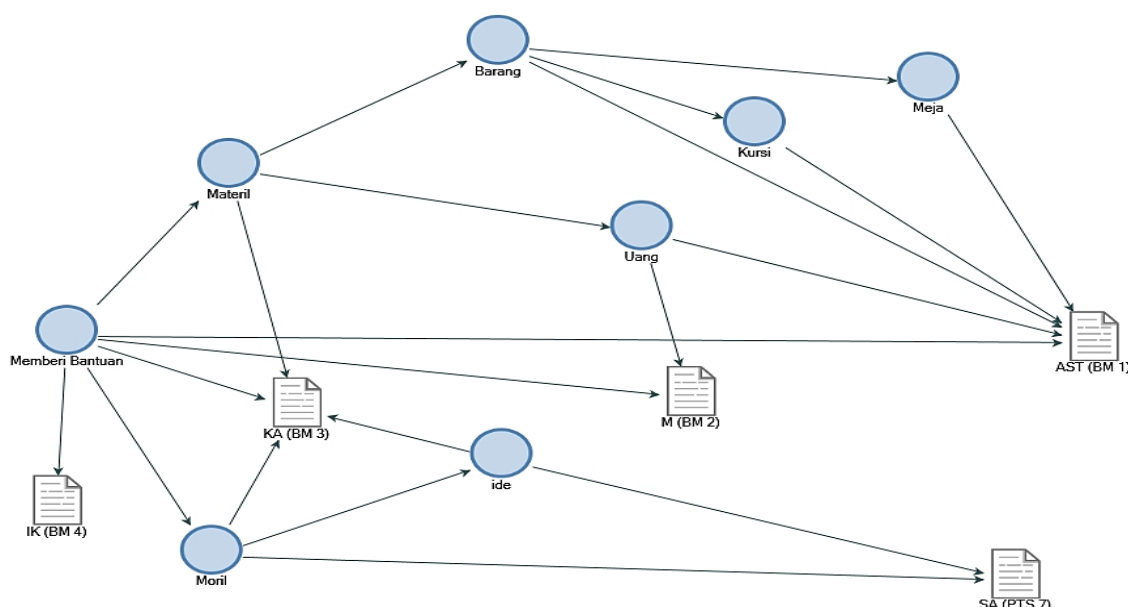


Gambar 5. Jejaring Spesifik Bentuk Partisipasi Pengelolaan Sekolah Berdasarkan Preferensi Informan

Meskipun secara umum, partisipasi komite dalam hal pendanaan dan kebijakan dapat dijelaskan dengan memanfaatkan temuan-temuan relevan yang telah diumumkan oleh penelitian-penelitian lain, misalnya oleh Kartono et al (2024) yang menekankan bahwa komite juga harus berperan dalam pendanaan program-program sekolah, yang secara langsung tidak dibiayai oleh APBN dan APBD. Lebih jauh, komite

juga berperan dalam mengevaluasi kebijakan (Ghozali & Ariskawanti, 2022). Namun keterbatasan keterangan informan terkait bentuk partisipasi mereka sebagai anggota komite, mungkin menjadi kendala tersendiri dalam

konteks penelitian ini. Bentuk partisipasi terakhir yaitu “*Memberi Bantuan*”, dalam kasus ini mungkin merupakan yang paling kompleks sesuai preferensi para informan (lihat gambar 6).



Gambar 6. Jejaring Spesifik Bentuk Partisipasi Memberi Bantuan Berdasarkan Preferensi Informan

Dalam kerangka ini, kecuali SA yang merupakan informan sekaligus anggota komite dari SD Inpres Pattallassang (disingkat PTS), anggota komite Batumenteng atau BM, tampaknya merupakan informan dominan pada bagian ini yang mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi mereka berdasarkan pengalaman, baik personal maupun kolektif. Secara umum, bentuk partisipasi

ini dapat dibagi ke dalam dua kriteria besar yaitu partisipasi dalam bentuk “*Materil*” dan “*Mori*” yang, pada gilirannya, kedua kriteria tersebut juga diklasifikasi berdasarkan preferensi para informan di mana kriteria-kriteria tersebut diperoleh. Untuk menangkap konteks, kriteria “*Materil*” misalnya, berdasarkan preferensi jawaban para informan, mencakup bantuan berupa “*Barang*” dan “*Uang*”. Yang terakhir (*Uang*) jelas

berupa nominal uang yang pada dasarnya, oleh para informan tidak secara spesifik dijelaskan atau jika dijelaskan seringkali menggunakan preferensi banyak atau sedikit dan karenanya, tidak memiliki rujukan aktual yang memungkinkan upaya untuk mengembangkan jawaban.

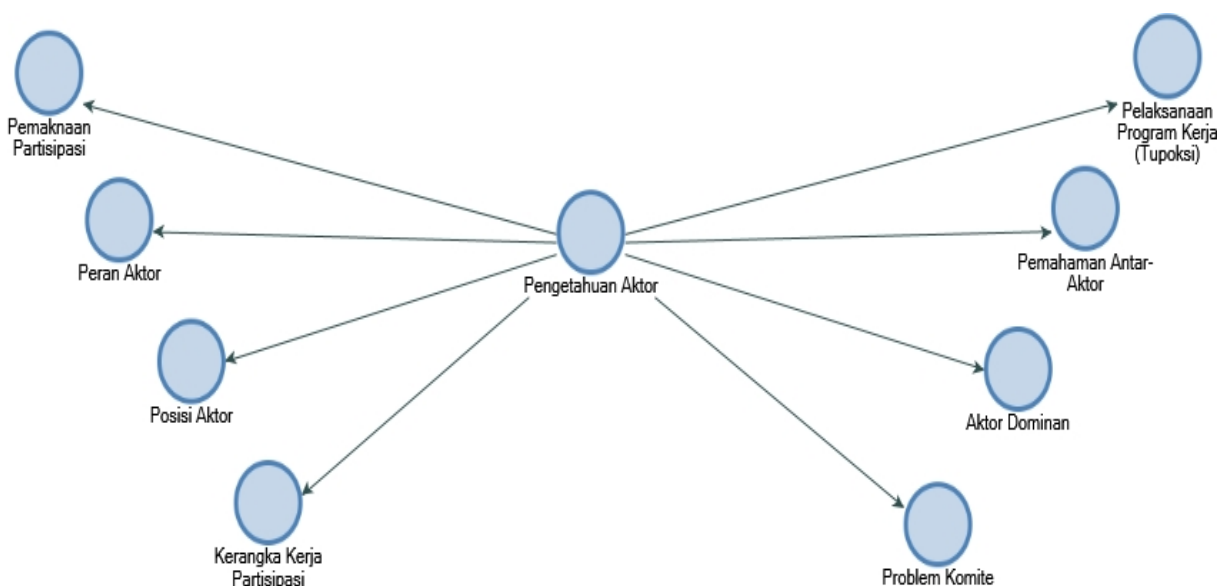
Namun terhadap bentuk pertama atau dalam hal ini, adalah Barang, dibagi ke dalam dua jenis yaitu "*Meja*" dan "*Kursi*". Sementara itu, untuk kriteria "*Moril*", hanya dibagi menjadi "*Ide*".

2. Faktor Penyebab Perbedaan Partisipasi Antar-Komite

Terdapat dua faktor utama yang menciptakan perbedaan mendasar dari partisipasi kedua subjek tersebut, yaitu "*Pengetahuan*" dan "*Modus*" atau "*Motivasi*" para aktor. Aspek Pengetahuan (seperti akan diperlihatkan oleh gambar 7) mencakup setidaknya

Gambaran ini, khususnya, bagi bentuk pertama dari bentuk partisipasi memberi bantuan (Materil dan Moril), bersesuaian dengan pendapat Anwar & Khausar (2023) yang mengatakan bahwa partisipasi anggota komite dalam meningkatkan mutu sekolah atau juga pendidikan secara umum, tidak hanya memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana, tetapi yang juga sangat penting adalah bantuan berupa ide dan gagasan bagi manajemen dan kebijakan sekolah.

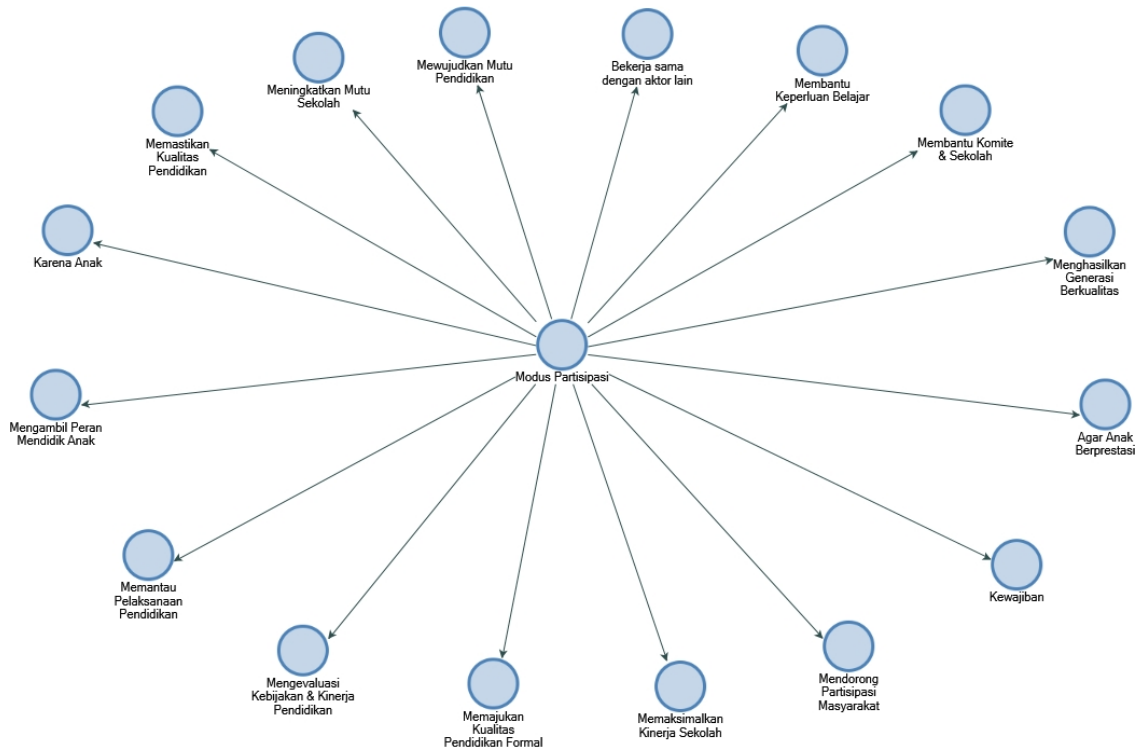
delapan kriteria spesifik dan mendasar tentang: a) Pemaknaan Partisipasi; b) Peran Aktor; c) Posisi Aktor; d) Kerangka Kerja Partisipasi; e) Pelaksanaan Program Kerja (sesuai tupoksi); f) Pemahaman antar-Aktor; g) Aktor Dominan, dan yang terakhir; h) Problem Komite.



Gambar 7. Jejaring Indikator Umum Faktor Pengetahuan

Sub-indikator “*Pemaknaan Partisipasi*” misalnya. Dalam konteks ini, menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara para aktor dalam cara mereka memaknai apa yang dimaksud dengan partisipasi juga proyeksi aktualnya terkait peran mereka. Demikian pula dengan sub-indikator lain seperti Peran, Posisi Aktor, Kerangka Kerja yang mereka gunakan dalam partisipasi dan lainnya. Sementara, sub-indikator umum yang termasuk ke dalam faktor motivasi atau modus partisipasi dapat dikatakan cukup kompleks. Karena merentang dalam setidaknya 16 kriteria yang berbeda satu sama lain (perhatikan gambar 20) berdasarkan preferensi masing-masing

informan, dari dorongan-dorongan internal-subjektif seperti “*Karena Anak*” mereka hingga dorongan-dorongan untuk “*Memajukan Kualitas Pendidikan Formal*” yang secara tentatif, dapat dikatakan eksternal-objektif. Setiap preferensi yang digunakan para informan pada dasarnya, merupakan representasi motivasi atau modus partisipasi mereka, yang oleh sebab itu, masing-masing informan memiliki satu atau lebih preferensi yang mereka gunakan untuk mendeskripsikan motivasi mereka, bahkan mungkin beberapa informan memiliki preferensi yang sama dalam hal ini dan pada prinsipnya, mewakili maksud dari masing-masing informan.



Gambar 8. Jejaring Indikator Umum Faktor Motivasi (Modus Partisipasi)

D. Kesimpulan

Penelitian studi kasus komparatif ini secara analitis, menyimpulkan beberapa hal penting berkaitan dengan fokus penelitian yaitu partisipasi komite dalam meningkatkan mutu sekolah bahwa secara bentuk, partisipasi komite Batumenteng dan Pattalassang berbeda satu sama lain di mana komite Batumenteng, hanya memiliki satu bentuk partisipasi yaitu “Memberi Bantuan”. Sedangkan partisipasi komite Pattalassang, cenderung memiliki bentuk yang lebih variatif antara lain yaitu: 1) Memastikan Kualitas Layanan

Pendidikan, juga; 2) Bakti Sosial, dan; 3) Pengelolaan Sekolah.

Perbedaan bentuk dan lebih jauh, upaya masing-masing komite dalam partisipasi mereka meningkatkan mutu sekolah secara umum, juga telah dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu: 1) *Faktor Pengetahuan*, dan; 2) *Faktor Motivasi* (Modus Partisipasi). Faktor pertama mencakup setidaknya 8 sub-indikator sementara untuk faktor terakhir jauh lebih kompleks dengan 16 sub-kriteria yang secara analitis, mempengaruhi berbagai upaya masing-masing komite melalui para anggota

mereka dalam partisipasi keduanya untuk meningkatkan mutu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1775–1783.
<https://doi.org/10.31851/jmksp.v5i2.3756>
- Anggraini, F. L., Hanurawan, F., & Hadi, S. (2018). Partisipasi Komite Sekolah pada Kegiatan Ekstrakurikuler. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(5), 544–551.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17977/jptpp.v3i5.10962>
- Anwar, S., & Khausar. (2023). Partisipasi Komite Sekolah Dalam Mengawasi Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 342–348.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61290/gm.v14i2.571>
- Askan, A., & Kusmanto, A. S. (2022). Peran Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 6325–6335.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3556>
- Bhaskar, R. (1976). *A Realist Theory of Science*. Leeds Books Ltd.
- Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51–64.
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>
- Febriana, L. (2019). Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Man 1 Palembang. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1(2), 152–163.
<https://doi.org/10.19109/pairf.v1i2.3234>
- Ghozali, M., & Ariskawanti, E. (2022). Peran Supporting Agency Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan. *Islamika*, 4(3), 504–515.
<https://doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1913>
- Hanafi, I. (2015). an Analysis of the Implementation of the Educational Policy: *Cakrawala Pendidikan*, 2(1), 58–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.4176>
- Hayani, N. (2015). Peran Komite Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 9(2), 315–327.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/mapen.v9i2.1125>
- Ismail, I., Hanim, Z., & Dwiyono, Y. (2021). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Di Sd Negeri Kongbeng, Kutim. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 1(1), 16–20.
<https://doi.org/10.30872/jimpian.v1i1.456>
- Kartono, S. M. A. N., Ariyah, Viana, V. O., & Kolis, N. (2024). ANALISIS PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMP N 2 BOJA KENDAL. *Pendas: Jurnal Ilmiah*

- Pendidikan Dasar*, 09, 1–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13921>
- Mar'ati, A. (2022). Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(3), 293–301.
<https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p293>
- Marfinda, E. (2022). Manajemen Supervisi Akademik Kepala Sekolah Danperankomitesekolahterhadapkinerjaguru. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(3), 238–248.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5178/academia.v2i3.1530>
- Merton, R. (1968). Manifest and Latent Functions. In *Social Theory and Social Structure* (Enlarged E). The Free Press (first published 1949).
- Nela Seriyanti, Syarwani Ahmad, & D. (2021). Hubungan Antara Managerial Kepala Sekolah Dan Iklim Organisasi Dengan Kinerja Guru,. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 6(1), 2021.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.3922>
- Parsons, T. (2005). *The Social System* (B. S. Turner (ed.); Translated). Routledge (First Published in 1951 by Routledge & Kegan Paul Ltd).
- Pohan, M. M. (2018). PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *Oxford University Press*, 2(2), 649.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v2i2.2025>
- Septiana, D. N., Bafadal, I., & Kusumaningrum, D. E. (2018). Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 293–301.
<https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p293>
- Supriadi, A. (2017). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran (JPP)*, 1(2), 88–100.
<https://doi.org/10.51454/jpp.v3i2.479>
- Tomasila, B., & Rumtutuly, F. (2021). Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pendidikan di SD Negeri 1 Amahusu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1), 57–62.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jiipi/article/view/3217>
- Yanuarita, H. A., Hanum, F., Suryani, D. T., & Indanadia, A. (2021). Bakti Sosial Peduli Siswa Kurang Mampu Di RA Al Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. *Sinar Sang ...*, 5(2), 128–135.
<http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/view/1664%0Ahttps://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/download/1664/1086>